

Tabel berikut menggambarkan komponen-komponen dari Pendapatan Bunga dari setiap periode:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Pendapatan Bunga dari pinjaman/penyediaan yang Diberikan ⁽¹⁾	6.192 6.797
Pendapatan Bunga dari Obligasi Pemerintah	3.926 3.723
Pendapatan Bunga dari Surat berharga ⁽²⁾	697 917
Pendapatan Bunga dari Penempatan di Bank Lain	592 812
Lain-lain ⁽³⁾	113 108
Total Pendapatan bunga	66.40 12.357

(1) Termasuk pendapatan dari produk Syariah
(2) Termasuk pendapatan bunga wesel dan tagihan lainnya
(3) Termasuk pendapatan dari pendapatan bunga dan non-kredit

Pendapatan Provisi dan Komisi atas pinjaman/penyediaan yang diberikan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Pendapatan provisi dan komisi atas pinjaman/penyediaan yang diberikan meningkat sebesar Rp249 miliar atau 11,3%, dari Rp318 miliar pada tahun 2004, menjadi Rp351 miliar pada tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kredit baru di tahun 2005, sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan provisi dan komisi.	451 681

Beban Bunga

Beban bunga meningkat Rp904 miliar, atau 19,8%, dari Rp4.563 miliar pada tahun 2004, menjadi Rp5.467 miliar pada tahun 2005. Peningkatan beban bunga sebesar Rp230 miliar merupakan kenaikan atas pendapatan bunga pinjaman dan kenaikan beban bunga sebesar Rp99 miliar atas surat berharga yang diterbitkan.

Tabel berikut menggambarkan komponen-komponen dari Beban Bunga dari setiap periode:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Beban Bunga atas Simpanan nasabah dan bank lain ⁽¹⁾	3.820 4.395
Beban Bunga atas Pinjaman yang Diterima ⁽²⁾	451 681
Beban Bunga atas Surat Berharga yang Diterbitkan	292 391
Total Beban Bunga	4.563 5.467

(1) Termasuk beban "Bagi Hasil Mudharabah dan Bonus Wadiah" yang dikategorikan sebagai lain-lain dalam laporan keuangan
(2) Termasuk beban bunga pinjaman subordinasi yang diterbitkan BNI senilai 250 juta Dollar AS

Beban Pendanaan lainnya

Beban pendanaan lainnya menurun sebesar Rp15 miliar atau 17,9%, dari Rp84 miliar di tahun 2004 menjadi Rp69 miliar di tahun 2005. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban provisi dan komisi dari pinjaman yang diterima dan pinjaman pasar uang, sejalan dengan penurunan rata-rata saldo pinjaman lainnya.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya turun sebesar Rp662 miliar, atau 24,0%, dari Rp2.763 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp2.101 miliar di tahun 2005. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba selisih kurs sebesar Rp112 miliar dan penurunan laba dari surat berharga sebesar Rp579 miliar di tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004, yang dikompensasi dengan kenaikan pendapatan dari premi asuransi Rp122 miliar pada periode yang sama.

Tabel berikut memberikan rincian komponen pendapatan operasional lainnya untuk masing-masing periode:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Provisi dan Komisi Jasa Perbankan Lainnya	1.261 1.172
Keuntungan Selisih Kurs-berbas	222 110
Keuntungan dari Kenaikan Nilai dan Penjualan Surat Berharga dan Obligasi Pemerintah	646 67
Pendapatan premi asuransi	142 264
Lain-lain	492 488
Total pendapatan operasional lainnya	2.763 2.101

Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif

Penyisihan kerugian aktiva produktif turun sebesar Rp872 miliar atau 41,0%, dari Rp2.128 miliar di tahun 2004, menjadi Rp1.256 miliar di tahun 2005. Disebabkan oleh meningkatnya kualitas aktiva produktif selama tahun 2005 dan disamping itu BNI melakukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi dan penilaian terhadap agunan-agnan sehingga dapat dipergunakan sebagai pengurang dalam perhitungan penyisihan kerugian aktiva produktif.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp1.066 miliar, atau 22,7%, dari Rp4.886 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp5.952 miliar di tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp376 miliar, peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp256 miliar.

Tabel berikut memberikan rincian komponen beban operasional lainnya untuk masing-masing periode:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.261 2.637
Beban Umum dan Administrasi	1.582 2.108
Beban asuransi	141 236
Biaya promosi	186 215
Lain-lain ⁽¹⁾	516 556
Total Beban operasional lainnya	4.886 5.752

(1) Termasuk beban promosi umum, asuransi, beban program penjaminan, beban asuransi, beban administrasi non-kredit, beban operasional lainnya (termasuk overhead, pajak dan beban lainnya dari kantor cabang luar negeri) dan lain-lain.

Labanya Operasional Bersih

Labanya operasional bersih turun sebesar Rp825 miliar atau 26,7%, dari Rp3.090 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp2.265 miliar di tahun 2005.

Labanya Non Operasional - Bersih

Labanya non operasional bersih BNI naik sebesar Rp6 miliar atau 37,5%, dari rugi non operasional sebesar Rp16 miliar di tahun 2004 menjadi rugi non-operasional Rp10 miliar pada tahun 2005. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penghapusan aktiva tetap.

Labanya Sebelum Pajak Penghasilan

Labanya sebelum pajak penghasilan turun sebesar Rp819 miliar atau 26,6%, dari Rp3.074 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp2.255 miliar pada tahun 2005.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan meningkat dari manfaat pajak sebesar Rp19 miliar di tahun 2004 menjadi biaya pajak penghasilan sebesar Rp39 miliar pada tahun 2005. Pada tahun 2004 BNI memiliki fasilitas 'tax loss carry forward' sehingga beban pajak Rp19 miliar merupakan pajak penghasilan untuk anak perusahaan.

Labanya Setelah Pajak Penghasilan

Labanya setelah pajak penghasilan turun Rp1.675 miliar, atau 54,2%, dari Rp3.093 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp1.417 miliar pada tahun 2005.

Hak Minoritas

Hak minoritas pada rugi bersih anak perusahaan turun sebesar Rp1 miliar dari Rp3 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp2 miliar di tahun 2005. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan rugi bersih anak perusahaan yang dikonsolidasikan.

Labanya bersih BNI tahun sebesar Rp1.675 miliar atau 54,2%, dari Rp3.090 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp1.415 miliar di tahun 2005.

6. Likuiditas dan Sumber Pemodal

Kegiatan usaha BNI selama tahun 2004, 2005 dan 2006 serta periode tiga bulan pertama tahun 2007, sebagian besar dibiayai oleh kombinasi antara penerimaan dari pendapatan bunga portofolio kredit, pendapatan bunga dan penjualan Obligasi Pemerintah serta meningkatnya jumlah simpanan. BNI juga memelihara cadangan likuiditas (giro wajib minimum) yang melebihi persyaratan minimum Bank Indonesia untuk mengantisipasi penarikan simpanan dalam jumlah besar oleh nasabah. BNI telah menggunakan sebagian besar dananya untuk pembayaran beban bunga atas simpanan dan pinjaman yang diterima, pemberian kredit, pembayaran kembali pinjaman yang diterima, dan pembayaran beban operasi (termasuk gaji dan tunjangan serta beban umum dan administrasi).

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi mengenai posisi likuiditas BNI:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Aktiva Likuid ⁽¹⁾	30.929 37.952
LDRe ⁽²⁾	55,1% 54,2%
Aktiva Likuid sebagai Persentase dari Total Aktiva	22,6% 25,7%
Aktiva Likuid sebagai Persentase dari Simpanan ⁽³⁾	29,4% 32,9%

(1) Aktiva likuid terdiri dari Kas, Giro pada Bank Indonesia dan bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan surat berharga (termasuk Obligasi Pemerintah) yang diperdagangkan.
(2) Tidak termasuk simpanan dari bank lain.
(3) Arus Kas

Tabel berikut ini memuat Ikhtisar Laporan Arus Kas BNI:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Arus kas bersih dari Aktivitas Operasional	(2.048) 2.022
Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	6.472 (51)
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.073) (1.156)

(Penurunan) Kenaikan bersih kas dan setara kas 3.351 815

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2007 adalah sebesar Rp2.314 miliar yang terutama disebabkan oleh penerimaan bunga, fee, dan komisi sebagai bagian dari pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.193 miliar, dan peningkatan jumlah simpanan dari nasabah sebesar Rp9.930 miliar, yang dikompensasi dengan pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp2.205 miliar, pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp1.257 miliar, peningkatan surat berharga sebesar Rp3.507 miliar, peningkatan pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp3.123 miliar, peningkatan penempatan pada bank lain dan bank Indonesia sebesar Rp2.514 miliar, dan penurunan surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali sebesar Rp500 miliar serta peningkatan biaya dibayar dimuka dan aktiva lain-lain sebesar Rp445 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2007 sebesar Rp2.449 miliar yang berasal dari penjualan bersih Obligasi Pemerintah sebesar Rp2.517 miliar, yang dikompensasi oleh penambahan dan penjualan aktiva tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007, sebesar Rp150 miliar karena terdapat kenaikan pinjaman yang diterima sebesar Rp693 miliar dan penurunan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp543 miliar.

Arus kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2006, sebesar Rp2.118 miliar dikarenakan terdapat penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp765 miliar, pembayaran dividen sebesar Rp750 miliar, dan penurunan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp582 miliar.

Arus kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2005, sebesar Rp1.156 miliar berasal dari peningkatan pinjaman yang diterima sebesar Rp413 miliar, yang dikompensasi oleh pembayaran dividen sebesar Rp1.568 miliar.

Arus kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2004, sebesar Rp1.073 miliar dikarenakan oleh penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp643 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp115 miliar.

8. Belanja Modal

Belanja modal BNI untuk tiga (tiga) tahun terakhir dan untuk periode tiga bulan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Tanah	74 16
Bangunan	61 106
Lain-lain	486 810
Total Belanja Modal	621 932

BNI berencana untuk melakukan belanja modal sebesar Rp933 miliar pada tahun 2007. Pada tahun 2007, terdiri dari Rp465 miliar untuk pengembangan kantor-kantor cabang dan renovasi, Rp328 miliar untuk teknologi informasi dan Rp140 miliar untuk belanja modal lainnya seperti perlengkapan kantor.

9. Kondisi Keuangan

Tabel berikut ini menerangkan komponen-komponen utama dari aktiva BNI untuk tanggal-tanggal berikut:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Kas	2.354 2.844
Giro Pada Bank Indonesia	10.958 11.281
Giro Pada Bank Lain	503 505
Penempatan Pada Bank Indonesia, dan Bank Lain	10.720 19.696
Efektif-Elek	6.519 3.816
Repo Surat Berharga	51 -
Wesel Ekspor dan Tagihan lainnya	911 1.413
Tagihan Derivatif	383 52
Kredit yang Diberikan	57.668 62.656
Tagihan Aseptasi	17.739 3.565
Obligasi Pemerintah	39.391 37.823
Penyertaan	2.320 1.549
Aktiva Tetap	4.812 4.519
Aktiva Pajak Tangguhan	101 156
Uang Muka dan Aktiva Lain-lain	3.124 3.691
Total Aktiva	136.582 147.812

(1) Total aktiva disajikan secara neto setelah penyisihan (net), sedang masing-masing aktiva produktif disajikan bruto.

Perbandingan antara 31 Maret 2007 dengan 31 Desember 2006

Total aktiva BNI meningkat sebesar Rp5.556 miliar atau 3,3%, dari Rp169.416 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp174.972 miliar per 31 Maret 2007, terutama disebabkan peningkatan aktiva likuid dan kredit yang diberikan, dimana hal ini dikompensasi oleh penurunan pada Obligasi Pemerintah.

Aktiva likuid meningkat sebanyak Rp4.647 miliar atau 8,6%, dari Rp3.793 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp5.444 miliar per 31 Maret 2007. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dana simpanan pada tahun 2006, dimana sebagian dikompensasi dengan sebagian besar dari eksekusi portofolio kredit dan pembayaran pinjaman yang diterima. BNI juga menjual sebagian kecil Obligasi Pemerintah untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007.

Obligasi Pemerintah menurun sebesar Rp1.498 miliar atau 3,7%, dari Rp4.015 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp2.517 miliar per 31 Maret 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan obligasi pemerintah.

Kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp2.672 miliar atau 4,0%, dari Rp6.460 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp9.132 miliar per 31 Maret 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian kompasan BNI untuk menyalurkan kredit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2007.

Perbandingan antara 31 Desember 2006 dengan 31 Desember 2005

Total aktiva BNI meningkat Rp12.604 miliar, atau 14,6%, dari Rp147.812 miliar per tanggal 31 Desember 2005, menjadi Rp169.416 miliar per tanggal 31 Desember 2006, ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo kredit dan Obligasi Pemerintah.

Aktiva likuid meningkat sebesar Rp19.471 miliar atau 56,7%, dari Rp37.952 miliar per 31 Desember 2005 menjadi Rp57.952 miliar per 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan giro pada Bank Indonesia dan penempatan dana pada bank lain dan Bank Indonesia sehubungan dengan kebutuhan meningkatkan cadangan primer dan sekunder sesuai peningkatan simpanan yang diterima tahun 2006.

Perbandingan antara 31 Desember 2005 dengan 31 Desember 2004

Total aktiva BNI meningkat Rp11.230 miliar, atau 8,2%, dari Rp136.582 miliar per 31 Desember 2004, menjadi Rp147.812 miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, dan peningkatan jumlah pinjaman.

Aktiva likuid meningkat sebesar Rp7.023 miliar atau 12,2%, dari Rp30.929 miliar per 31 Desember 2004 menjadi Rp37.952 miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, sehubungan dengan kebutuhan peningkatan cadangan primer dan sekunder akibat peningkatan dana simpanan yang diterima (dan penurunan jumlah surat berharga terkait reklasifikasi Obligasi Pemerintah).

Obligasi Pemerintah menurun Rp1.549 miliar, atau 3,9%, dari Rp39.391 miliar per 31 Desember 2004 menjadi Rp37.823 miliar per 31 Desember 2005. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian Obligasi Pemerintah di pasar sukuk sebesar Rp3.982 miliar dan yang dikompensasi dengan penjualan sebesar Rp3.768 miliar dan yang jatuh tempo sebesar Rp1.317 miliar. Ditambah dengan transaksi jual beli surat utang pemerintah luar negeri selama tahun berjalan.

10. Kawajiban dan Ekuitas

Tabel berikut ini menjabarkan komponen utama dari kewajiban BNI untuk tanggal-tanggal berikut:

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
2004	2005
Kewajiban Segera	1.151 1.436
Simpanan Nasabah	105.097 115.372
Repo Surat Berharga	50 -
Kewajiban Derivatif	125 139
Kewajiban Aseptasi	1.714 3.545
Surat Berharga Yang Diterbitkan	2.103 2.117
Hutang Pajak	4.388 4.009
Hutang Pajak Tangguhan	53 281
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	220 126

Kewajiban dibayar dimuka dan kewajiban lain-lain 3.016 3.218

Pinjaman Subordinasi 2.285 2.433

Total Kewajiban 123.930 135.891

Perbandingan antara 31 Maret 2007 dengan 31 Desember 2006

Total kewajiban BNI meningkat sebesar Rp5.798 miliar atau 3,8%, dari Rp154.599 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp160.397 miliar per 31 Maret 2007 yang terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dan peningkatan pinjaman yang diterima yang sebagian dibalangi oleh penurunan kewajiban akseptasi dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi.

Simpanan dari nasabah mengalami peningkatan sebesar Rp93 miliar atau 4,4%, dari Rp135.797 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp141.728 miliar per 31 Maret 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada simpanan dalam mata uang Rupiah sebesar Rp7.057 miliar yang dikompensasi dengan penurunan simpanan dalam mata uang asing sebesar Rp1.127 miliar. Umumnya BNI mengalami peningkatan tahun-tahun simpanan mata uang asing sekitar 200 - 300 ribu Dollar AS oleh Pemerintah antara bulan September dan Februari. Simpanan dalam mata uang Rupiah meningkat Rp4.133 miliar atau 5,1%, dari Rp114.881 miliar per 31 Desember 2006 menjadi Rp120.784 miliar per 31 Maret 2007 yang disebabkan oleh peningkatan pada simpanan deposito Rupiah, rekening giro Rupiah dan tabungan Rupiah.

Perbandingan antara 31 Desember 2006 dengan 31 Desember 2005

Total kewajiban BNI meningkat Rp18.706 miliar, atau 13,8%, dari Rp135.891 miliar per 31 Desember 2005, menjadi Rp154.599 miliar per 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah yang sebagian dibalangi oleh penurunan pinjaman yang diterima.

Simpanan nasabah dan bank lain meningkat Rp20.391 miliar, atau 17,3%, dari Rp117.750 miliar per 31 Desember 2005, menjadi Rp138.141 miliar per 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat bunga. Saldo rata-rata rekening giro sebesar Rp2.358 miliar, atau 9,78%, dari Rp24.059 miliar di tahun 2005 menjadi Rp26.477 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata tabungan Rupiah menurun Rp822 miliar atau 2,3% dari Rp36.433 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp35.060 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata deposito berjangka Rupiah meningkat Rp13.201 miliar atau 47%, dari Rp30.124 miliar di tahun 2005 menjadi Rp43.327 miliar di tahun 2006, sebagian dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito berjangka BNI dari rata-rata 7,5% per 31 Desember 2005 menjadi rata-rata 9,4% per 31 Desember 2006.

Pinjaman yang diterima menurun Rp87 miliar, atau 16,4%, dari Rp4.796 miliar per tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp4.009 miliar per tanggal 31 Desember 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok hutang dari kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya sehingga penurunan sebesar Rp462 miliar dan adanya penurunan dari pinjaman yang diterima dalam mata uang asing sebesar Rp254 miliar.

Perbandingan antara 31 Desember 2005 dengan 31 Desember 2004

Total kewajiban BNI meningkat Rp11.961 miliar, atau 9,7%, dari Rp123.930 miliar per 31 Desember 2004, menjadi Rp135.891 miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dan peningkatan kewajiban akseptasi.

Simpanan nasabah dan bank lain meningkat Rp8.870 miliar, atau 8,1%, dari Rp108.880 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp117.750 miliar di tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat bunga. Saldo rata-rata rekening giro sebesar Rp2.358 miliar, atau 9,78%, dari Rp24.059 miliar di tahun 2005 menjadi Rp26.477 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata tabungan Rupiah menurun Rp822 miliar atau 2,3% dari Rp36.433 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp35.060 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata deposito berjangka Rupiah meningkat Rp13.201 miliar atau 47%, dari Rp30.124 miliar di tahun 2005 menjadi Rp43.327 miliar di tahun 2006, sebagian dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito berjangka BNI dari rata-rata 7,5% per 31 Desember 2005 menjadi rata-rata 9,4% per 31 Desember 2006.

Pinjaman yang diterima menurun Rp87 miliar, atau 16,4%, dari Rp4.796 miliar per tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp4.009 miliar per tanggal 31 Desember 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok hutang dari kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya sehingga penurunan sebesar Rp462 miliar dan adanya penurunan dari pinjaman yang diterima dalam mata uang asing sebesar Rp254 miliar.

Perbandingan antara 31 Desember 2006 dengan 31 Desember 2005

Total kewajiban BNI meningkat Rp18.706 miliar, atau 13,8%, dari Rp135.891 miliar per 31 Desember 2005, menjadi Rp154.599 miliar per 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah yang sebagian dibalangi oleh penurunan pinjaman yang diterima.

Simpanan nasabah dan bank lain meningkat Rp20.391 miliar, atau 17,3%, dari Rp117.750 miliar per 31 Desember 2005, menjadi Rp138.141 miliar per 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat bunga. Saldo rata-rata rekening giro sebesar Rp2.358 miliar, atau 9,78%, dari Rp24.059 miliar di tahun 2005 menjadi Rp26.477 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata tabungan Rupiah menurun Rp822 miliar atau 2,3% dari Rp36.433 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp35.060 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata deposito berjangka Rupiah meningkat Rp13.201 miliar atau 47%, dari Rp30.124 miliar di tahun 2005 menjadi Rp43.327 miliar di tahun 2006, sebagian dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito berjangka BNI dari rata-rata 7,5% per 31 Desember 2005 menjadi rata-rata 9,4% per 31 Desember 2006.

Pinjaman yang diterima menurun Rp87 miliar, atau 16,4%, dari Rp4.796 miliar per tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp4.009 miliar per tanggal 31 Desember 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok hutang dari kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya sehingga penurunan sebesar Rp462 miliar dan adanya penurunan dari pinjaman yang diterima dalam mata uang asing sebesar Rp254 miliar.

Perbandingan antara 31 Desember 2005 dengan 31 Desember 2004

Total kewajiban BNI meningkat Rp11.961 miliar, atau 9,7%, dari Rp123.930 miliar per 31 Desember 2004, menjadi Rp135.891 miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dan peningkatan kewajiban akseptasi.

Simpanan nasabah dan bank lain meningkat Rp8.870 miliar, atau 8,1%, dari Rp108.880 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp117.750 miliar di tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat bunga. Saldo rata-rata rekening giro sebesar Rp2.358 miliar, atau 9,78%, dari Rp24.059 miliar di tahun 2005 menjadi Rp26.477 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata tabungan Rupiah menurun Rp822 miliar atau 2,3% dari Rp36.433 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp35.060 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata deposito berjangka Rupiah meningkat Rp13.201 miliar atau 47%, dari Rp30.124 miliar di tahun 2005 menjadi Rp43.327 miliar di tahun 2006, sebagian dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito berjangka BNI dari rata-rata 7,5% per 31 Desember 2005 menjadi rata-rata 9,4% per 31 Desember 2006.

Pinjaman yang diterima menurun Rp87 miliar, atau 16,4%, dari Rp4.796 miliar per tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp4.009 miliar per tanggal 31 Desember 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok hutang dari kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya sehingga penurunan sebesar Rp462 miliar dan adanya penurunan dari pinjaman yang diterima dalam mata uang asing sebesar Rp254 miliar.

Perbandingan antara 31 Desember 2005 dengan 31 Desember 2004

Total kewajiban BNI meningkat Rp11.961 miliar, atau 9,7%, dari Rp123.930 miliar per 31 Desember 2004, menjadi Rp135.891 miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dan peningkatan kewajiban akseptasi.

Simpanan nasabah dan bank lain meningkat Rp8.870 miliar, atau 8,1%, dari Rp108.880 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp117.750 miliar di tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat bunga. Saldo rata-rata rekening giro sebesar Rp2.358 miliar, atau 9,78%, dari Rp24.059 miliar di tahun 2005 menjadi Rp26.477 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata tabungan Rupiah menurun Rp822 miliar atau 2,3% dari Rp36.433 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp35.060 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata deposito berjangka Rupiah meningkat Rp13.201 miliar atau 47%, dari Rp30.124 miliar di tahun 2005 menjadi Rp43.327 miliar di tahun 2006, sebagian dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito berjangka BNI dari rata-rata 7,5% per 31 Desember 2005 menjadi rata-rata 9,4% per 31 Desember 2006.

Pinjaman yang diterima menurun Rp87 miliar, atau 16,4%, dari Rp4.796 miliar per tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp4.009 miliar per tanggal 31 Desember 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok hutang dari kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya sehingga penurunan sebesar Rp462 miliar dan adanya penurunan dari pinjaman yang diterima dalam mata uang asing sebesar Rp254 miliar.

Perbandingan antara 31 Desember 2005 dengan 31 Desember 2004

Total kewajiban BNI meningkat Rp11.961 miliar, atau 9,7%, dari Rp123.930 miliar per 31 Desember 2004, menjadi Rp135.891 miliar per 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dan peningkatan kewajiban akseptasi.

Simpanan nasabah dan bank lain meningkat Rp8.870 miliar, atau 8,1%, dari Rp108.880 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp117.750 miliar di tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tingkat bunga. Saldo rata-rata rekening giro sebesar Rp2.358 miliar, atau 9,78%, dari Rp24.059 miliar di tahun 2005 menjadi Rp26.477 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata tabungan Rupiah menurun Rp822 miliar atau 2,3% dari Rp36.433 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp35.060 miliar pada tahun 2006. Saldo rata-rata deposito berjangka Rupiah meningkat Rp13.201 miliar atau 47%, dari Rp30.124 miliar di tahun 2005 menjadi Rp43.327 miliar di tahun 2006, sebagian dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito berjangka BNI dari rata-rata 7,5% per 31 Desember 2005 menjadi rata-rata 9,4% per 31 Desember 2006.

Pinjaman yang diterima menurun Rp87 miliar, atau 16,4%, dari Rp4.796 miliar per tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp4.009 miliar per tanggal 31 Desember 2006. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pokok hutang dari kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya sehingga penurunan sebesar Rp462 miliar dan adanya penurunan dari pinjaman yang diterima dalam mata uang asing sebesar Rp254 miliar.

Perbandingan antara 31 Desember 2005 dengan 31 Desember 2004</

BNI berupaya untuk meningkatkan usaha perbankan internasional melalui ekspansi pembiayaan dan jasa trade finance pada kantor-kantor cabang luar negeri. Sejak bulan Mei 2004, penguasaan aktivitas trade financing telah disentralisasikan di kantor pusat. Selain itu, kantor-kantor cabang di luar negeri juga didukung oleh lebih dari 800 bank korespondensi di 35 negara.

11. Produk-Produk Simpanan
Produk-produk simpanan utama BNI adalah deposito berjangka, tabungan dan giro. Per 31 Maret 2007, BNI memiliki total simpanan Rp41,1 miliar, terdiri dari Rp34,9 miliar untuk deposito berjangka, Rp5,2 miliar untuk tabungan, dan Rp1,0 miliar untuk giro. Produk simpanan memberikan sumber dana yang murah dan stabil untuk BNI serta mempresentasikan potensi pertumbuhan yang dapat memperbaiki komposisi pendapatan (*funding mix*) BNI secara keseluruhan. Produk-produk simpanan BNI juga ditawarkan kepada para individu berpenghasilan menengah ke atas dan individu yang masuk ke dalam golongan nasabah berpenghasilan tinggi.

Nasabah Deposito
BNI menawarkan deposito berjangka dan giro kepada nasabah institusi (BUMN/Institusi) Pemerintah dan perusahaan swasta) termasuk kepada nasabah perbankan internasional. Per 31 Maret 2007, total jumlah simpanan nasabah untuk Perbankan Korporasi dan komersial adalah sebesar Rp33,795 miliar. Simpanan dari nasabah BUMN/Institusi Pemerintah mewakili 23,8% dari nilai simpanan nasabah per 31 Maret 2007. Simpanan dari nasabah perusahaan swasta dan komersial mencerminkan 27,9% dari nilai total simpanan nasabah per tanggal yang sama.

Nasabah Individu
BNI menawarkan produk deposito berjangka, tabungan dan giro untuk para nasabah individu. Per tanggal 31 Maret 2007, total jumlah simpanan dari nasabah individu adalah Rp6,464 miliar atau sekitar 46,7% dari total keseluruhan jumlah simpanan di BNI.

Nasabah Syariah
Per 31 Maret 2007, jumlah total simpanan nasabah Syariah adalah Rp1.237 miliar yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah atau 0,87% dari total nilai simpanan BNI per tanggal yang sama.

Nasabah dan Pemasaran
BNI memasarkan produk simpanannya melalui para *banking account manager, relationship manager*, tim pemasaran di cabang maupun di lapangan, serta *customer service* di kantor-kantor cabang.

BNI terus meningkatkan jumlah pendanaan dan meningkatkan basis nasabah, terutama dari Bisnis UKM, melalui penawaran kebijakan BNI difokuskan kepada faktor-faktor yang sama dengan faktor-faktor yang digunakan dalam persetujuan kredit dan fasilitas trade finance. Hal ini mencakup kegiatan usaha, kondisi keuangan dan riwayat pembayaran; peringkat risiko konsumen dan peringkat risiko industri/konflik keuangan, jenis dan nilai agunan, penguasaan, integritas dan kredibilitas manajemen.

Jasa Trade Finance
BNI menyediakan berbagai jasa trade finance kepada nasabah korporasi dan komersial, seperti pembiayaan ekspor-impor, pembiayaan L/C, bank garansi, dan fasilitas negotiable warehouse receipt. Pendapatan yang didapat dari fee dan komisi trade finance adalah sebesar Rp1.021,2 miliar di tahun 2006 dan Rp2.46 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007.

Tresuri
Divisi Tresuri melakukan kegiatan trading dan investasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba serta pengendalian posisi kredit dan posisi valansi dengan. Divisi Tresuri BNI juga memberikan jasa layanan terhadap produk-produk pasar uang, pasar modal, dan valuta asing (*asset advisory*) yang transaksi valuta asing dan sebagai perantara dalam produk-produk (*liability*) serta jasa kustodian dan wali amanat.

Jasa lain dan aktivitas pendukung lainnya adalah Wali Amanat, Kustodian, Bank Notes, Banking Management, dan Unit Risik.

Untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, Divisi Tresuri meluncurkan layanan baru dalam bentuk *Foreign Exchange* dan *Foreign Trading*. BNI juga menawarkan sistem aplikasi transaksi internal-protoคอล kepada para nasabahnya yang menggunakan nasabah untuk mendapatkan tingkat nilai tukar valuta asing dan melakukan transaksi valuta asing online secara real-time.

12. Jaringan Distribusi
Jaringan distribusi BNI tersebar luas di berbagai pusat ekonomi utama dan pusat bisnis di seluruh Indonesia. Per 31 Maret 2007 BNI memiliki 919 kantor cabang domestik termasuk kantor cabang pembantu, yang di dalamnya termasuk 29 kantor cabang, 183 kantor cabang pembantu dan 6 kantor kas di wilayah Jabodetabek yang ada 187 kantor cabang dan 488 kantor cabang pembantu di luar wilayah Jabodetabek. BNI juga memiliki 23 kantor cabang dan 30 kantor cabang pembantu Syariah, 12 Sentra Kredit Konsumen, 17 Sentra Kredit Menengah, 47 Sentra Kredit Kecil yang melayani segmen usaha kecil dan 2.325 mesin ATM. Jaringan luar negeri BNI berada di lokasi strategis pusat-pusat perdagangan dan keuangan internasional utama di dunia. BNI memiliki kantor cabang luar negeri di Hong Kong, London, Singapura, dan sebuah kantor agency di New York.

Jaringan Nasional
Kantor Pusat
Sebagai pusat kegiatan usaha dan organisasi, kantor pusat juga merupakan pusat pelayanan nasabah korporasi dan merupakan pusat *relationship manager* BNI.

Kantor cabang dan kantor cabang pembantu
BNI membagi jaringan kantor cabang dalam negeri menjadi kantor cabang dan kantor cabang pembantu berdasarkan nilai aktiva, jumlah karyawan, total nilai simpanan dan kredit, serta layanan dalam negeri dan internasional.

Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah
Kantor cabang Syariah BNI menyediakan produk dan layanan Syariah, yang dipekerjakan oleh *relationship manager* dan tenaga *customer service* yang terlatih dalam produk-produk dan layanan Syariah. Kantor cabang Syariah menyediakan layanan transaksi, produk non-kredit, dan jasa penasihat keuangan untuk produk-produk Syariah BNI.

Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah
Per 31 Maret 2007, BNI memiliki 47 Sentra Kredit Kecil yang melayani segmen nasabah usaha kecil dan 17 Sentra Kredit Menengah untuk melayani segmen nasabah usaha menengah. Sentra-sentra kredit ini memiliki *relationship manager* yang didedikasikan untuk melayani produk-produk pembiayaan.

Sentra Kredit Konsumen
Per 31 Maret 2007, BNI memiliki 12 Sentra Kredit Konsumen untuk melayani nasabah individu. Sentra Kredit Konsumen memiliki tim sales yang berdedikasi untuk menawarkan produk-produk dan jasa layanan pembiayaan untuk nasabah individu.

Jaringan ATM, Kartu ATM, dan Kartu Kredit
BNI memiliki jaringan mesin ATM yang merupakan jaringan ATM terbesar ketiga di Indonesia per 31 Maret 2007 berdasarkan jumlah ATM. Per 31 Maret 2007, Jaringan ATM yang dimiliki meliputi 2.325 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 697 juta kartu ATM dalam sirkulasi. BNI memiliki rencana untuk menambah sekitar 157 mesin ATM pada akhir tahun 2007.

Phone banking
BNI menyediakan layanan *telephone banking* ("BNI PhonePlus") yang memungkinkan nasabah melakukan transfer dana, memindahkan saldo rekening, mengisi ulang pulsa telepon seluler pra-bayar, dan membayar tagihan seperti kartu kredit dan asuransi. Nasabah juga dapat mengakses informasi mengenai rangkaian produk dan layanan BNI melalui BNI PhonePlus.

BNI Mobile & BNI SMS Banking
BNI Mobile & BNI SMS Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui telepon selular. Dengan BNI Mobile yang menggunakan *Sim Card khusus (Telkomsel Navigator Card)*, nasabah dapat bertransaksi menggunakan fasilitas menu dari telepon selular mereka. Jika nasabah tidak menginginkan penggantian nomor telepon selular, BNI menyediakan layanan transaksi perbankan melalui BNI SMS Banking. Layanan yang diberikan melalui SMS Banking adalah transfer dana ke rekening BNI lain, pembayaran tagihan dan penggantian nomor PIN. Melalui BNI SMS Banking, nasabah melakukan transaksi dengan cara mengirimkan SMS ke BNI single access number "3346". Jumlah pengguna aktif BNI SMS Banking dan BNI Mobile telah lebih dari 150 ribu nasabah aktif.

Internet Banking
Fasilitas layanan Internet Banking diperkenalkan pada bulan Maret 2007. Dengan fasilitas layanan tersebut, nasabah melakukan transaksi rekening, mengisi ulang pulsa telepon seluler pra-bayar, dan membayar tagihan seperti kartu kredit dan asuransi. Nasabah juga dapat mengakses informasi mengenai rangkaian produk dan layanan BNI melalui BNI Internet Banking.

Jaringan Internasional
Kegiatan usaha internasional BNI berada di pusat-pusat perdagangan dan keuangan dunia, seperti Hong Kong, London, Singapura, Tokyo, dan New York. Kantor cabang luar negeri berfungsi secara independen dari Kantor pusat dalam hal pemenuhan kewajiban pendanaan dan pemberian kredit dalam mata uang asing kepada nasabah berdasarkan *limit* yang ditetapkan di masing-masing kantor cabang, serta pemenuhan kewajiban internasional. Kantor-kantor cabang BNI di luar negeri umumnya melayani nasabah nasional yang memiliki operasi di luar negeri, termasuk penjaminan, transfer dana dan *remittance*, penempatan L/C dan layanan perbankan untuk keperluan *trade finance* lainnya. Per 31 Maret 2007, kegiatan usaha BNI di luar negeri didukung oleh jaringan 757 bank koresponden internasional, 93 bank koresponden dalam negeri dan sejumlah aliansi strategis internasional melalui keanggotaan asosiasi perbankan internasional.

13. Persaingan
BNI menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank-bank besar lainnya di Indonesia dan bank-bank asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, BNI juga menghadapi persaingan dari institusi keuangan lain seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan, serta dari perusahaan-perusahaan yang memiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah yang memberikan pendanaan pengembangan industri dan pembiayaan jasa ekspor-impor. Selain itu, Pemerintah telah mengizinkan bank asing untuk mendirikan kantor cabang di Indonesia dan bank-bank asing yang telah dan akan beroperasi di Indonesia dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan BNI.

14. Aktiva Tetap
Kantor Pusat BNI terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220. BNI menggunakan lebih dari 549.397 meter persegi ruangan kantor untuk kegiatan usahanya di Indonesia dan 6.722 meter persegi ruangan kantor untuk kegiatan usaha di luar negeri BNI.

BNI memiliki lebih dari 333.990 meter persegi ruangan kantor, termasuk 294.744 meter persegi yang digunakan untuk kantor-kantor cabang dalam negeri BNI dan pusat perbankan lainnya, 39.240 meter persegi yang digunakan untuk kantor-kantor cabang BNI di luar negeri, dan 1.816 meter persegi untuk kantor cabang Hong Kong. Nilai buku bersih dari aktiva tetap yang dimiliki BNI per 31 Maret 2007 adalah Rp2.575 miliar.

15. Teknologi Informasi
Proses *up-grading* dan perbaikan teknologi informasi secara berkesinambungan dipercaya sebagai kunci keberhasilan untuk memastikan kemampuan bersaing dalam industri perbankan Indonesia dan juga meningkatkan penguasaan internal serta sistem manajemen risiko. Sampai dengan saat ini, BNI telah melakukan *upgrade* dan modernisasi atas platform Teknologi Informasi.

16. Asuransi
Kebijakan BNI adalah mengasuransikan dalam jumlah yang memadai untuk seluruh properti yang dimiliki terhadap risiko kebakaran dan risiko umum lainnya. Per 31 Maret 2007, BNI telah mengasuransikan barangnya (tidak termasuk tanah), kendaraan bermotor dan peralatan terhadap kerugian fisik atau kerusakan dengan total penutupan asuransi sejumlah Rp1.293 miliar dan 52,8 juta Dollar US yang dijamin cukup untuk timbul kembali kerugian yang diakibatkan dengan bangunan dan peralatan. BNI juga menggunakan jasa asuransi untuk risiko usahanya seperti kehilangan uang tunai atau surat berharga akibat kehilangan atau pencurian. BNI juga memiliki kebijakan yang mewajibkan penutupan asuransi untuk seluruh agunan yang diberikan oleh nasabah.

17. Perpajakan
Rugi pajak yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya dapat dikurangkan terhadap laba kena pajak hingga lima tahun setelah tahun kerugian tersebut terjadi. Untuk tahun-tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2005, 2006, dan 2007, kerugian yang dapat dikurangkan adalah Rp335,7 miliar, dan Rp911,1 miliar. Untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2004 BNI telah mengkompensasikan akumulasi rugi pajak yang berasal dari tahun fiskal 1998 dan 1999 yang telah jatuh tempo pada tahun fiskal 2004 sebesar Rp1.084 miliar. Sampai tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, BNI tidak menimbulkan rugi secara fiskal, sehingga saldo akumulasi rugi pajak pada tanggal 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006 adalah nihil.

PENGOLAAN RISIKO DAN KEPATUHAN

1. Pendahuluan
BNI menghadapi beberapa risiko yang berkaitan dengan transaksi simpanan, kredit yang diberikan, kegiatan usaha manajemen risiko, serta risiko yang berhubungan dengan lingkungan tempat beroperasi. Tujuan BNI dalam manajemen risiko adalah memastikan agar BNI dapat memahami, mengukur, dan mengelola berbagai risiko yang timbul serta agar BNI dapat menjaga mungkin mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam mengatasi risiko yang dihadapi. Selain risiko yang dihadapi BNI adalah risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko perdagangan risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko trading (*trading risk*), risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko kepatuhan, strategi dan hukum (*compliance*, strategi dan hukum), dan risiko reputasi. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit dan penilaian risiko kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

2. Organisasi
Sebagai bagian dari perbaikan sistem manajemen risiko, BNI telah membangun struktur tata kelola manajemen risiko yang bersifat *multi-layered* (*multi-layered risk management governance structure*). Salah satu titik utama dari struktur ini adalah pemisahan fungsi manajemen risiko kredit dan kepatuhan dari fungsi kegiatan operasi bisnis BNI. Fungsi manajemen risiko kredit dan kepatuhan dijalankan secara terpisah dan berdiri sendiri independen di kantor pusat. Petugas manajemen risiko kredit dan kepatuhan juga berfungsi secara independen dan terpisah dari unit bisnis. BNI juga memiliki petugas pengendalian risiko kredit yang terpisah dari unit bisnis. Petugas manajemen risiko kredit dan kepatuhan juga memiliki tanggung jawab kepada Divisi Risiko Kredit di kantor pusat. Selain itu, setiap unit yang ditetapkan petugas *quality assurance*, yang bertanggung jawab kepada Divisi Kepatuhan di kantor pusat. Sebagai hasil reorganisasi BNI, Divisi Kebijakan dan Manajemen Risiko, Divisi kepatuhan, dan Satuan Pengawas Internal bersifat independen dari unit bisnis strategis BNI.

Badan tertinggi dalam struktur organisasi BNI adalah Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewan Direksi. Pada tahun 2003, Dewan Komisaris membentuk Komite Risiko dan Kapital untuk memastikan pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

3. Risiko Kredit
Tinjauan
Risiko kredit adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

4. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar, suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Risiko pasar yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

5. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Risiko likuiditas yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

6. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kepercayaan publik terhadap BNI. Risiko reputasi yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

7. Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

8. Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

9. Risiko Lingkungan
Risiko lingkungan adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

10. Risiko Teknologi Informasi
Risiko teknologi informasi adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

11. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kepercayaan publik terhadap BNI. Risiko reputasi yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

12. Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

13. Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

14. Risiko Lingkungan
Risiko lingkungan adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

15. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kepercayaan publik terhadap BNI. Risiko reputasi yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

16. Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

17. Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

18. Risiko Lingkungan
Risiko lingkungan adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/cedera janji debitur atau pihak ketiga lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Risiko kredit yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

19. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kepercayaan publik terhadap BNI. Risiko reputasi yang dihadapi BNI terutama terdapat dalam transaksi kredit yang diberikan, *trade finance* dan Tresuri. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah meninjau kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kredit, BNI membuat sistem manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank Indonesia tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Komersial dan Dokumen pendukung lainnya dari Komite Basell tentang Supervisi Bank, khususnya kesesuaian dengan Basel II. Sebagai bagian dari usaha yang dimulai di tahun 2000 untuk mencapai standar manajemen risiko yang *best-in-class* secara internasional, BNI secara berkelanjutan mengembangkan dan memperbaiki *framework* manajemen risiko untuk mengimplementasikan sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi dan terpadu dalam pemenuhan kewajiban perbankan, pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen risiko. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pada tingkat perusahaan (*bank-wide*) serta penerapannya pada bisnis dan operasi BNI. Pada tingkat operasional, BNI membentuk Divisi Manajemen Risiko, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis, untuk merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga membentuk Divisi Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap *framework*, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko.

Kebijakan dan Prosedur Kredit
BNI telah mempunyai kebijakan dan prosedur kredit yang diberikan secara tertulis yang menjelaskan secara rinci mengenai prosedur untuk analisis dan persetujuan kredit, *review credit* (*credit review*), pemantauan, dan restrukturisasi serta penanganan kredit bermasalah. Melalui kebijakan kredit yang diberikan, BNI berupaya untuk menjaga kualitas aktiva. Kebijakan tersebut meliputi analisis kredit dan pemantauan kecukupan kredit secara periodik, diversifikasi portofolio, agunan yang dipersyaratkan dan pengendalian internal.

BNI memiliki perlunya peningkatan kemampuan manajemen risiko kredit. Hingga saat ini BNI telah melakukan perbaikan atas prosedur dan kebijakan pada Bisnis Korporasi, Bisnis Komersial/UKM dan Bisnis Konsumen dalam usahanya untuk menyesuaikan dengan praktik perbankan internasional (*International Best Practice*). BNI saat ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mempunyai komitmen kuat untuk meningkatkan budaya kredit yang sehat BNI agar sesuai dengan standar internasional.

Analisis dan Persetujuan Kredit
Proses persetujuan kredit BNI yang diberikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- pemohonan kredit;
- analisis dan evaluasi dilakukan oleh manajer bisnis dan manajer risiko kredit;
- negosiasi kredit;
- penentuan jumlah kredit, tingkat bunga, persyaratan dan struktur secara umum;
- rekomendasi untuk mendapatkan keputusan kredit;
- menyiapkan formulir kredit;
- penempatan (atau penolakan) kredit;
- mengkomunikasikan hasil keputusan kredit kepada nasabah;
- penyelesaian dan pembuatan perjanjian kredit dan seluruh dokumentasi yang diperlukan; dan pencairan kredit.

Tinjauan dan Pengawasan Kredit
Kinerja semua kredit dan fasilitas trade finance diawasi secara reguler oleh unit bisnis yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diberikan tersebut. Kredit usaha kecil dan konsumen diawasi oleh kantor cabang, sentra kredit atau Sentra Kredit Konsumen yang terkait, tergantung dari tingkat kewenangan persetujuan kredit dari kantor cabang atau Sentra Kredit Konsumen. Kredit korporasi dan komersial serta fasilitas trade finance diawasi oleh kantor pusat. Dalam mengawasi kredit-kredit dan fasilitas trade finance tersebut, kebijakan BNI difokuskan kepada faktor-faktor yang sama dengan faktor-faktor yang digunakan dalam persetujuan kredit dan fasilitas trade finance. Hal ini mencakup kegiatan usaha, kondisi keuangan dan riwayat pembayaran; peringkat risiko konsumen dan peringkat risiko industri/konflik keuangan, jenis dan nilai agunan, penguasaan, integritas dan kredibilitas manajemen.